

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Anwari, Achmad, 1994, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ashafa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Grameia Pusaka Utama, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- H.S., Salim, “*Perkembangan Hukum Kontrak di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahamdi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kosnumen*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Az., 2014, *Hukum Perlindunan Konsumen suatu pengantar*, Diadit Media, Jakarta,.

- Nugroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, hlm.68.
- Santoso, Djohari dan Achmad Ali, 1989, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum UII, Yogyakarta.
- Sidartha, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, hlm. 120.
- Sjahdeinni, Sutan Renny, 1993, *kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank Indonesia*, Institute Banker Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepratigna, Paulus J., 2007, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Subekti, 2002, *hukum perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sunaryo, 2014, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryodiningrat, R.M, 1985, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung.

### **Jurnal :**

Dewi, Putu Eka Trisna, “*Exoneration Clause* pada Perjanjian Standar Pembiayaan Konsumen”, Jurnal Advokasi, Vol. 6, No 2, September 2017.

Purwanto, Harry, “Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Internasional”, Mimbar Hukum, Vol.21, No.1, Februari 2009.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keaslian dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No.2, Mei 2014.

### **Tesis dan Disertasi:**

Kurniawan, Rendy, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Atas Objek Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi : Analisis Perjanjian Sewa Guna Usaha PT Indomobil Finance Indonesia*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mulia, Farolan Agung, 2015, *Analisis Hukum Terhadap Pemutusan Perjanjian Sewa Guna Usaha/ Leasing Kapal Akibat Overmacht/ Force Majeure Antara PT Karya Teknik Multifinance Dan PT Pelayaran Karya Citra Nusabaruna*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Puspitasari, Ratna, 2014, *Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah pada Perumahan Palm Residence Kota Surabaya (Analisis Hukum terhadap Tahap Pra dan Kontraktual Penyusunan Kontrak Baku Sehubungan dengan*

*Keberadaan Klausula Eksonerasi*), Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 90.

Wantu, Fence M., 2011, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan kemanfaatan di peradilan perdata (ringkasan disertasi)*, program pascasarjana fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

#### **Internet :**

Nikmah, Nurul, 2018, “Pengaruh Ukuran Font pada Pemahaman Membaca Siswa”, <http://eprints.unm.ac.id/8474/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2018.

Sutrawaty, Laras, “*Force Majeure* Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata”, <https://media.neliti.com/media/publications/150045-ID-force-majeure-sebagai-alasan-tidak-dilak.pdf>, diakses pada tanggal 25 Juni 2017.

Website PT X, “Pembiayaan Alat Berat, Truk dan Mesin-Mesin”, <https://www.bfi.co.id/products-services/heavy-equipment-trucks-and-machineries-financing>, diakses pada tanggal 11 Juli 2018.

Website PT X, “Pembiayaan Kendaraan Bermotor”, <https://www.bfi.co.id/products-services/automobiles-financing>, diakses pada tanggal 11 Juni 2018.

Website PT X, “Pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa”,

<https://www.bfi.co.id/products-services/procurement-of-goods-and-services-financing>, diakses pada tanggal 11 Juli 2018.

Website PT X, “Produk dan Layanan”, <https://www.bfi.co.id/products-services/automobiles-financing>, diakses pada tanggal 17 Maret 2018.

Website PT X, “Sejarah Perusahaan”, <https://www.bfi.co.id/about-us/company-history>, diakses Pada Tanggal 11 Juni 2018.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53 (Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 18 Maret 2009)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa

Guna Usaha. (Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 27 November 1991).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan

Pembiayaan (Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 September 2006).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyatakan bahwa

seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan

Debitur wajib dibuat secara tertulis.(Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

19 Nopember 2014)